



PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Semester 1 Tahun 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG

KATA PENGANTAR

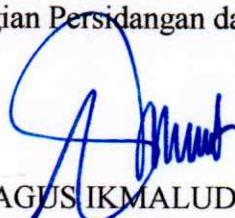
Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Semester I Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terdapat dalam laporan ini merupakan cerminan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang. Hasil dan saran Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana perbaikan kualitas kinerja pelayanan secara berkelanjutan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.

Semoga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemalang, 10 Juli 2023

Plh. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan



AGUS IKMALUDIN, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700828 199203 1 006

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	1
C. Tujuan	2
D. Prinsip	2
E. Manfaat	3
BAB II	
Analisis dan Pembahasan	4
A. Profil Unit Pelayanan	4
B. Metode Pelaksanaan	4
1. Perencanaan	
2. Tim Pelaksana Survei	
3. Lokasi	
4. Waktu Pelaksanaan	
5. Teknik Survei	
6. Responden	
7. Bentuk Jawaban	
8. Pengolahan dan Analisis Data	
9. Penyusunan Laporan	
C. Analisis dan Pembahasan	6
1. Karakteristik Responden	
2. Indeks Nilai Perunsur Pelayanan	
3. Saran Perbaikan	
BAB IV	
Penutup	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	10
C. Rencana Tindak Lanjut	10

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Untuk mengukur sejauhmana kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat diterima oleh pengguna layanan perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pelaksanaan pelayanan. Hal ini selaras dengan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat diketahui mutu layanan dan kinerja setiap unsur pelayanan, serta dapat diketahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kumpulan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Masih kurang optimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus lebih memacu untuk lebih serius dalam memberikan pelayanan sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan perbaikan terhadap kinerja pemerintah melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dimana dari hasil survey ini akan diketahui sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan melakukan evaluasi berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat, diharapkan kelemahan yang ada dalam pelayanan publik dapat diperbaiki.

B. Maksud

Maksud dari kegiatan ini, adalah :

- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya;
- b. Memetakan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna layanan;
- c. Mengidentifikasi harapan masyarakat akan pelayanan publik di Sekretariat DPRD.

C. Tujuan

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, adalah :

- a. Terukurnya kepuasan masyarakat pada pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023 Semester I;
- b. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
- c. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Sekretariat DPRD;
- d. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan pelayanan Sekretariat DPRD;
- e. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator Renstra Sekretariat DPRD;
- f. Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.

D. Prinsip

Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Manfaat

Survei kepuasan masyarakat memiliki manfaat yaitu:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing- masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan publik

BAB II

Analisis dan Pembahasan

A. Profil Unit Pelayanan

Sebagai lembaga yang memfasilitasi pelayanan administratif kepada Anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang berperan dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, perencanaan, dan keuangan, rapat-rapat, penyediaan tenaga ahli dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan. Peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD harus ditunjang dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung fungsi tersebut.

Dalam melaksanakan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD, Sekretaris DPRD bertugas merumuskan kebijakan dan inovasi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD serta menyediakan informasi publik dan penyusunan data informasi kesekretariatan DPRD. Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 5 (lima) Jabatan Fungsional yaitu :

1. Kepala Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Kepala Bagian Program dan Keuangan terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - b. Perencana Ahli Muda
3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Perundangan Ahli Muda
 - c. Perencana Ahli Muda

B. Metode Pelaksanaan

1. Perencanaan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di unit pelayanan lingkup Pemerintah Kabupaten Pematang pada tahun 2023 Semester I ini dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Survei;
- b. Penyusunan Instrumen Survei;
- c. Penentuan Besaran dan Teknik Penarikan Sampel;
- d. Penentuan Responden;
- e. Pelaksanaan Survey;

- f. Pengolahan Hasil Survei;
 - g. Penyajian Laporan Hasil Survei.
2. Tim Pelaksana Survei
Tim pelaksana SKM Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - 1) Pengarah.
 - 2) Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Ketua.
 - b) Anggota sekaligus sebagai surveior.
 - 3) Sekretariat.
 3. Lokasi
Lokasi pelaksanaan SKM dilaksanakan di Sekretariat DPRD.
 4. Waktu Pelaksanaan
Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan pada bulan Januari - Juni tahun 2023.
 5. Teknik Survei
Untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat DPRD tahun 2023 Semester I, tim pelaksana survei menggunakan teknik pengisian kuesioner melalui Google Form kepada Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya sebagai penerima pelayanan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang Jaya.
 6. Responden
Responden adalah 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya.
 7. Bentuk Jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila :
 - a. Diberi nilai 3 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
 - b. Diberi nilai 4 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

8. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan. Dokumen tersebut menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111111$$

Interpretasi nilai SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

9. Penyusunan Laporan

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, sehingga terstandartisasi. Selain itu Survei Kepuasan Masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

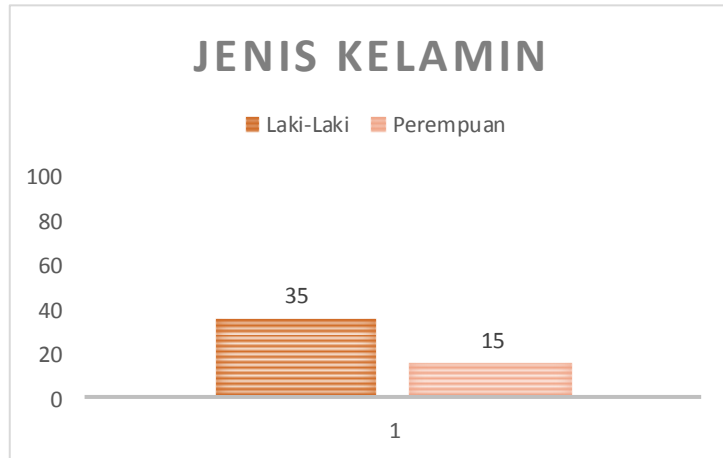
C. Analisis dan Pembahasan

Target responden Survei Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD tahun 2023 Semester I ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Pematang sebanyak 50 (lima puluh) orang. Hasil analisis data survei disampaikan sebagai berikut:

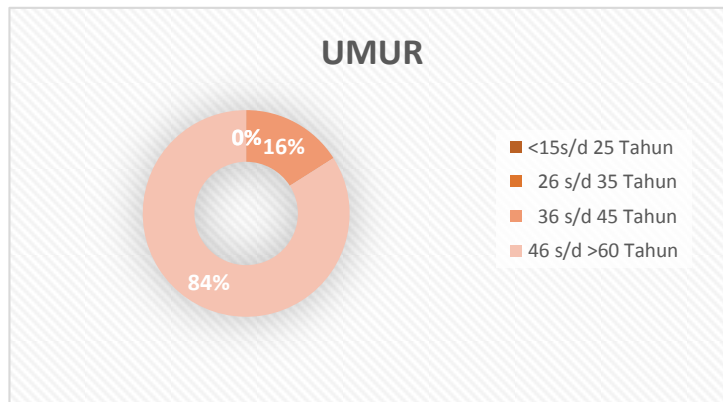
1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penyusunan SKM Pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2023 Semester I dapat disampaikan sebagai berikut:

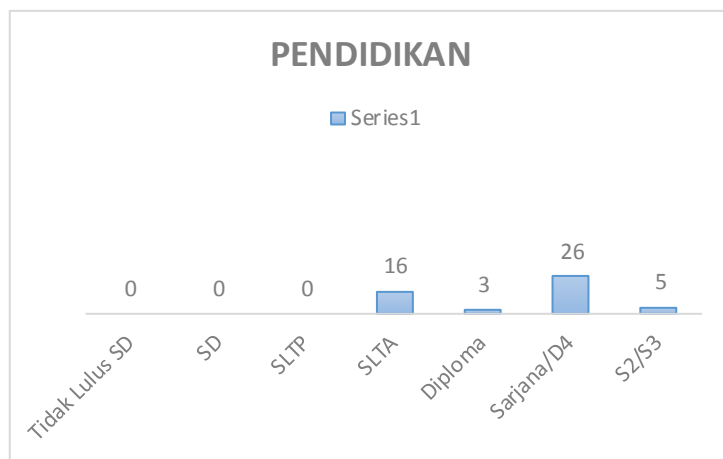
- a. Karakteristik responden pada Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berdasarkan jenis kelamin.



- b. Karakteristik responden pada Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berdasarkan usia.

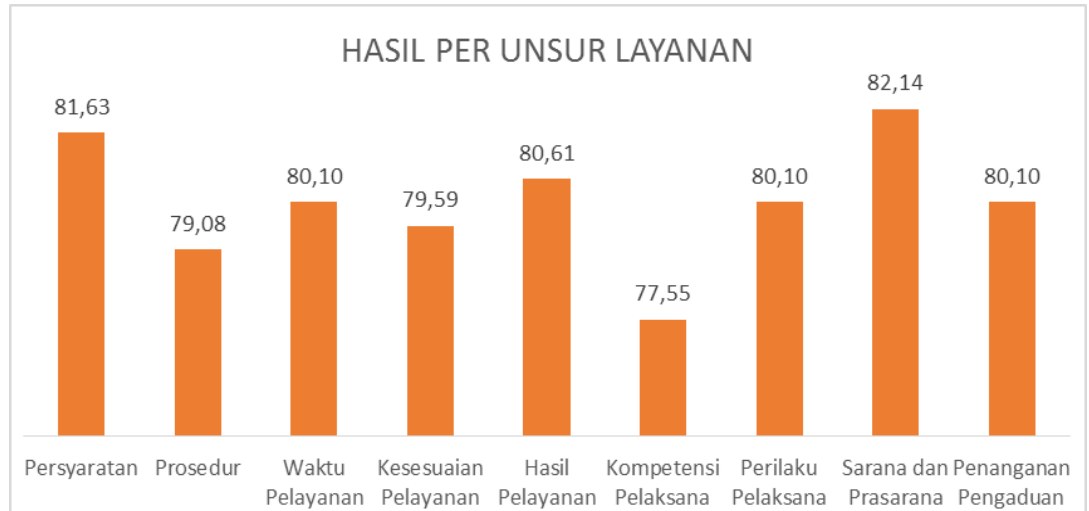


- c. Karakteristik responden pada Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berdasarkan pendidikan.



2. Indeks Nilai Per unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2023 Semester I, indeks per unsur pelayanan meliputi:



3. Saran Perbaikan

Terdapat saran perbaikan yang disampaikan langsung oleh responden melalui survei kepuasan masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang. Beberapa saran perbaikan tersebut antara lain:

- a. Perlu dioptimalkan pelayanan administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur masing-masing kegiatan.
- b. Peningkatan kualitas kemampuan sumber daya pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.
- c. Sarana perkantoran perlu dibenahi seperti penyediaan tangga khusus untuk difabel selain lift.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka berikut ini disimpulkan beberapa hal:

1. Rangkuman hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang :

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
1	Syarat	81,63	Baik
2	Prosedur	79,08	Baik
3	Waktu Pelayanan	80,10	Baik
4	Kesesuaian Pelayanan	79,59	Baik
5	Hasil Pelayanan	80,61	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	77,55	Baik
7	Perilaku Pelaksana	80,10	Baik
8	Sarana dan Prasarana	82,14	Baik
9	Penanganan Pengaduan	80,10	Baik
IKM		80,02	Sesuai Kategori

2. Sesuai dengan indeks yang diperoleh, maka jika merujuk pada pengkategorisasian mutu layanan dapat dikatakan bahwa kinerja **pelayanan publik Sekretariat DPRD masuk pada kategori B (Baik)**. Diantara 9 (Sembilan) layanan publik yang disurvei, semua layanan memperoleh predikat baik. Meskipun telah memperoleh predikat baik dalam hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, penyelenggara layanan hendaknya tidak cepat berpuas diri dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

A. Saran

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat, masukan dari responden yang telah mengisi kuesioner akan dijadikan bahan evaluasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki pelayanan, antara lain:

1. Penerapan SOP kegiatan DPRD secara optimal sehingga pelayanan administrasi kegiatan DPRD dapat berjalan dengan lancar.
2. Evaluasi SOP masing-masing kegiatan DPRD apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembinaan pegawai dan evaluasi kinerja pegawai pelaksana pelayanan.
4. Peningkatan kompetensi pegawai pada Sekretariat DPRD dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop sesuai bidang tugas masing-masing.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dilakukan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Syarat: - Persyaratan pelayanan	- Persyaratan pelayanan dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan	- Kepala Bagian Umum - Kepala Bagian Program dan Keuangan - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
2.	Prosedur - Prosedur pelayanan	- Menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Mensosialisasikan masing- masing SOP kegiatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	- Kepala Bagian Umum - Kepala Bagian Program dan Keuangan - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Waktu -Waktu yang dibutuhkan	Sosialisasi dan pelatihan bagi pegawai dalam melakukan pelayanan kedewanan agar sesuai dengan SOP	Kepala Bagian Umum

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Kesesuaian - Kesesuaian pelayanan	Memfasilitasi administrasi kesekretariatan DPRD dan administrasi keuangan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Umum - Kepala Bagian Program dan Keuangan - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
5.	Hasil - Hasil pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan program dan kegiatan kedewanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Umum - Kepala Bagian Program dan Keuangan - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
6.	Kompetensi Pelaksana - Kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan	Bimtek/workshop peningkatan kualitas dan mutu pelayanan bagi pegawai sesuai bidang tugasnya	Kepala Bagian Umum

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
7.	Perilaku Pelaksana - Keramahan pegawai dalam melakukan pelayanan	Pelatihan dan pembinaan bagi pegawai dalam melakukan pelayanan kedewanan secara menyeluruh	Kepala Bagian Umum
8.	Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana kesekretariatan	Kepala Bagian Umum
9.	Penanganan Pengaduan	Mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat pada website DPRD (e-asmara) dan media sosial	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

KUESIONER SKM

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Kegiatan survey ini dilakukan oleh Sekretariat Kab. Pemalang yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Kab. Pemalang dengan periode waktu pelayanan di bulan Januari - Juni Tahun 2023

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Usia Responden *

Pilih

Jenis Kelamin Responden *

Pilih

Pendidikan Terakhir Responden *

Pilih

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Pemalang

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Pematang

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Pematang

- Tidak Cepat
- Kurang Cepat
- Cepat
- Sangat Cepat

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan dengan standar pelayanan

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Pematang

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan

- Tidak Baik
- Kurang Baik
- Baik
- Sangat Baik

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kab. Pematang

- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pada Sekretariat DPRD Kab. Pematang

- Tidak Memuaskan
- Kurang Memuaskan
- Memuaskan
- Sangat Memuaskan

Apa saran Saudara untuk perbaikan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang?

Jawaban Anda _____

INSTRUMEN PENGOLAHAN DATA KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

UNIT PELAYANAN : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG
 ALAMAT : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, BEJI, TAMAN, PEMALANG
 TELEPON : (0284) 321006

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KET.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	
4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	2	3	3	2	2	3	2	2	3	
8	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
9	4	4	4	4	3	3	2	4	4	
10	3	2	3	2	3	3	3	3	3	
11	4	3	3	3	4	2	3	3	3	
12	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	3	3	3	3	3	3	4	
14	4	3	3	4	3	3	3	4	3	
15	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
16	3	3	3	4	4	4	4	4	3	
17	3	3	3	2	4	4	3	4	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	3	3	4	4	3	4	3	4	
21	3	3	3	2	2	3	3	3	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
23	4	3	4	4	3	3	4	3	4	
24	4	3	4	3	4	3	3	3	2	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
27	3	3	3	3	3	4	3	2	2	
28	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
30	3	4	4	4	3	4	3	4	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
32	4	4	3	4	4	3	3	3	3	
33	3	3	3	3	3	2	3	4	3	
34	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
35	4	3	3	3	3	4	4	4	4	
36	4	4	3	3	4	3	4	3	3	
37	3	3	4	3	3	3	3	3	4	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
39	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
40	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

43	3	3	4	4	4	2	4	4	3
44	3	3	3	2	3	2	3	4	3
45	3	3	2	2	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	4	3	4	4	4	4	4	3	3
49	3	3	4	3	3	3	3	4	3
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ΣNilai /Unsur	160	155	157	156	158	152	157	161	157
NRR / Unsur	3,265	3,163	3,204	3,184	3,224	3,102	3,204	3,286	3,204
NRR tertbg/ unsur	0,362	0,351	0,356	0,353	0,358	0,344	0,356	0,365	0,356
IKM Unit Pelayanan									3,201
									80,022

Keterangan:

- U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang Per unsur = NRR per unsur x 0.111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,27
U2	Prosedur	3,16
U3	Waktu Pelayanan	3,20
U4	Kesesuaian Pelayanan	3,18
U5	Hasil Pelayanan	3,22
U6	Kompetensi Pelaksana	3,10
U7	Perilaku Pelaksana	3,20
U8	Sarana dan Prasarana.	3,29
U9	Penanganan Pengaduan,Saran,Masukan	3,20

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00**
- B (Baik) : 76,61 - 88,30**
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60**
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99**

IKM UNIT PELAYANAN :	80,02
	BAIK

